



Strategi Advokasi Kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bogor

Policy Advocacy Strategy by the Environmental Agency in Waste Management in Bogor City

Rifqi Galan Firdaus^{1*}, Denny Hernawan², Neng Virly Apriliyani³

Administras Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda

Email : rifqigalanfirdaus@gmail.com^{1*}, denny.hernawan@unida.ac.id², neng.virly.apriliyani@unida.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 28-06-2026

Revised : 30-06-2026

Accepted : 02-07-2026

Published : 04-07-2026

Abstract

The problem of waste management in Bogor City is still characterized by low community participation, despite the implementation of policies and programs by the Environmental Agency (DLH). This condition indicates a gap between policy and practice in the field. The research questions in this study are: how the policy advocacy strategy is carried out by the Bogor City DLH, what roles stakeholders play, and what supporting and inhibiting factors exist. This study aims to critically analyze policy advocacy strategies in increasing community participation. It applies Coffman's and Beer (2015) policy advocacy strategy theory, using a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The research findings indicate that the Bogor City Environmental Agency (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor) has implemented waste management policy advocacy strategies targeting the public, influencers, and decision-makers through socialization programs, environmental education, cleanliness campaigns, Waste Bank programs, the utilization of digital media, and coordination with various stakeholders. These strategies have contributed to increasing public awareness and support for waste management initiatives. However, behavioral change in the form of concrete actions remains suboptimal due to low community participation, persistent littering habits, limited facilities and infrastructure, and the lack of optimal collaboration and participatory communication. Therefore, strengthening participatory communication, enhancing cross-sector collaboration, improving supporting facilities, and implementing behavior-based evaluation mechanisms are necessary to ensure more effective and sustainable waste management in Bogor City.

Keywords: *policy advocacy strategy, community participation, waste management*

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bogor masih ditandai oleh rendahnya partisipasi masyarakat, meskipun kebijakan dan program telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi kebijakan yang dilakukan DLH Kota Bogor, bagaimana peran pemangku kepentingan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis strategi advokasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori strategi advokasi kebijakan Coffman & Beer (2015) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah melaksanakan strategi advokasi kebijakan



pengelolaan sampah kepada kelompok publik (public), pemengaruh (influencers), dan pengambil keputusan (decision makers) melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, kampanye kebersihan, program Bank Sampah, pemanfaatan media digital, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi tersebut telah mampu meningkatkan kesadaran (awareness) dan dukungan (will) sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Namun, perubahan dalam bentuk tindakan nyata (action) masih belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya kolaborasi dan komunikasi partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan kolaborasi lintas sektor, penyediaan fasilitas pendukung, serta evaluasi berbasis perubahan perilaku agar pengelolaan sampah di Kota Bogor dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: strategi advokasi kebijakan, partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah masih menjadi isu lingkungan global yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, produksi sampah diperkirakan mencapai sekitar 69,9 juta ton per tahun, namun hanya sekitar 60–70% yang dapat dikelola secara optimal (Rahmatul et al). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, tingginya pola konsumsi masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengelolaan sampah. Dampaknya terlihat dari meningkatnya pencemaran lingkungan, risiko penyakit berbasis lingkungan, hingga besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam pengelolaan sampah (Kaza et al., 2018). Oleh karena itu, pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, salah satunya melalui program Indonesia Bersih Sampah 2025 yang menekankan pengurangan sampah, peningkatan kegiatan daur ulang, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga.

Sebagai salah satu kota penyangga DKI Jakarta, Kota Bogor menghadapi persoalan pengelolaan sampah yang cukup kompleks. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mencatat volume sampah mencapai sekitar 700 ton per hari, namun sekitar 26% di antaranya belum dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga masih menumpuk di berbagai wilayah kota. Selain keterbatasan kapasitas pengelolaan, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi kendala yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya perilaku membuang sampah sembarangan serta rendahnya kebiasaan memilah sampah dari sumbernya (Soeharsono, Hamdi, & Maryani, 2023).

Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah maupun program bank sampah diperkirakan masih berada pada kisaran 30–40%, sehingga sistem pengelolaan sampah masih didominasi pola konvensional kumpul–angkut–buang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis, tetapi memerlukan strategi yang mampu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara aktif.



Dalam konteks tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan lingkungan, termasuk melakukan advokasi kepada masyarakat. Advokasi kebijakan merupakan proses komunikasi yang bertujuan membangun pemahaman, memengaruhi perilaku, serta mendorong dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan (Fajar et al., 2017). Melalui berbagai bentuk sosialisasi, edukasi, kampanye lingkungan, serta kolaborasi dengan komunitas, strategi advokasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi masih lebih berorientasi pada penyampaian informasi daripada membangun komunikasi dua arah yang mampu mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian mengenai pengelolaan sampah selama ini umumnya lebih banyak membahas aspek teknis, seperti infrastruktur dan sistem pengangkutan sampah, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi advokasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih relatif terbatas, khususnya di Kota Bogor (Januar, 2022,). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di lapangan, sehingga diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana strategi advokasi kebijakan dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas advokasi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian advokasi kebijakan dan komunikasi publik, serta menjadi bahan masukan praktis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam strategi advokasi kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah. Permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan implementasi kebijakan, tetapi juga proses komunikasi, interaksi antar pemangku kepentingan, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan advokasi di lapangan.

Bahan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan penelitian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di bagi menjadi tiga kategori yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen. Alat penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, observasi, alat perekam suara, kamera atau telepon genggam untuk dokumentasi, buku catatan lapangan, dan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai lokasi utama penelitian karena instansi tersebut merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota



Bogor. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada beberapa lokasi pendukung, seperti Bank Sampah, TPS3R, dan wilayah masyarakat yang menjadi sasaran program advokasi pengelolaan sampah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan pelaksanaan strategi advokasi yang dilakukan oleh DLH Kota Bogor. Penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai strategi advokasi, bentuk komunikasi, tingkat partisipasi masyarakat, serta berbagai kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan advokasi maupun aktivitas pengelolaan sampah di lapangan tanpa terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, serta literatur yang relevan. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian; penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif, dan tabel sehingga mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan interpretasi terhadap seluruh data yang telah diperoleh untuk menjawab tujuan penelitian mengenai strategi advokasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, peran para pemangku kepentingan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah. Keabsahan hasil penelitian diperkuat melalui proses triangulasi sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

LANDASAN TEORITIS

Teori Strategi Advokasi (Coffman & Beer 2015)

Menurut Coffman & Beer (2015), Advokasi merupakan serangkaian upaya terencana yang dilakukan untuk memengaruhi kebijakan publik, keputusan, maupun tindakan para pemangku kepentingan guna menciptakan perubahan sosial yang diinginkan. Dalam konteks kebijakan publik, advokasi tidak hanya berfokus pada perubahan regulasi, tetapi juga pada proses membangun dukungan masyarakat, memengaruhi opini publik, dan menggerakkan para pengambil keputusan (Coffman & Beer, 2015). Coffman menegaskan bahwa strategi advokasi kebijakan adalah proses terencana yang menggabungkan advokasi kebijakan, publik, dan komunitas untuk menciptakan perubahan sosial dan kebijakan secara berkelanjutan dan juga Coffman & beer menekankan bahwa keberhasilan advokasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan aktor dalam merancang strategi yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, serta membangun komunikasi yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat (Coffman & Beer, 2015). Oleh karena itu, strategi advokasi harus dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahapan atau dimensi yang saling berkaitan. Teori ini menekankan 2 dimensi utama yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu audiens kebijakan (audiences) dan perubahan yang diharapkan (changes). Melalui



pemahaman terhadap dimensi-dimensi ini, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor menjalankan strategi advokasi kebijakannya dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas strategi advokasi yang telah dilakukan serta kontribusinya terhadap terwujudnya kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Bogor (Coffman & Beer, 2015).

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Coffman dan Beer, 2015

Bagan kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bogor mendorong lahirnya kebijakan pengelolaan sampah sebagai dasar tindakan pemerintah daerah (Rizky & Saputra, 2024). Dimensi Audiens Advokasi (Audiences) mengukur sasaran yang dituju oleh strategi advokasi Dinas Lingkungan Hidup, yaitu masyarakat (public), kelompok yang memiliki pengaruh terhadap opini dan kebijakan (influencers), serta pengambil keputusan (decision makers).



Dimensi Perubahan yang Diharapkan (Changes) mengukur perubahan yang ingin dicapai melalui advokasi, yaitu peningkatan kesadaran (awareness), terbentuknya kemauan atau dukungan (will), dan terwujudnya tindakan nyata (action) dalam pengelolaan sampah. Melalui strategi tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan peningkatan kesadaran masyarakat, pengurangan volume sampah, dan terciptanya pengelolaan sampah yang efektif serta berkelanjutan di Kota Bogor (Mozin et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor dengan melibatkan 17 informan yang terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, serta analisis dokumen. Analisis dilakukan menggunakan teori strategi advokasi Coffman dan Beer yang menitikberatkan pada dimensi audiences (publik, influencers, dan decision makers) serta changes (awareness, will, dan action).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Bogor telah melaksanakan strategi advokasi pengelolaan sampah melalui berbagai bentuk komunikasi publik, seperti sosialisasi, penyuluhan, kampanye lingkungan, edukasi di sekolah, pemanfaatan media sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah dan TPS3R. Strategi tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai sasaran utama, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, komunitas lingkungan, media massa, sekolah, serta pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan dimensi audiences, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merupakan sasaran utama advokasi. Sebagian masyarakat telah memahami pentingnya pemilahan sampah dan mulai berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Namun demikian, partisipasi tersebut belum merata karena masih ditemukan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan rendahnya konsistensi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah. Kelompok influencers seperti RT/RW, komunitas lingkungan, sekolah, dan media massa berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyebaran informasi dan edukasi lingkungan. Sementara itu, decision makers seperti Pemerintah Kota Bogor, DPRD, kecamatan, dan kelurahan memberikan dukungan melalui regulasi, koordinasi program, dan penyediaan anggaran.

Jika dianalisis menggunakan teori Coffman dan Beer, strategi advokasi DLH Kota Bogor telah memenuhi unsur penentuan audiens advokasi secara komprehensif. Keterlibatan berbagai kelompok audiens menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan aktor-aktor yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan Coffman dan Beer yang menyatakan bahwa keberhasilan advokasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi membangun dukungan dari berbagai kelompok sasaran secara simultan.

Pada dimensi changes, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi telah berhasil meningkatkan awareness masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi. Peningkatan kesadaran tersebut diikuti dengan munculnya will, yaitu kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, Bank Sampah, TPS3R, dan pengolahan sampah organik. Namun demikian, pada tahap action, perubahan perilaku



masyarakat belum berlangsung secara optimal. Masih ditemukan masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah secara konsisten serta masih bergantung pada sistem pengelolaan sampah konvensional kumpul–angkut–buang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi advokasi DLH Kota Bogor lebih berhasil meningkatkan aspek pengetahuan dibandingkan perubahan perilaku masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyampaian informasi saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Menurut Coffman dan Beer, keberhasilan advokasi tidak hanya diukur dari meningkatnya kesadaran, tetapi juga dari kemampuan mendorong masyarakat hingga melakukan tindakan nyata. Oleh karena itu, strategi advokasi perlu diperkuat melalui pendampingan, komunikasi partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan strategi advokasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain dukungan kebijakan pemerintah daerah, keterlibatan komunitas lingkungan, keberadaan Bank Sampah dan TPS3R, pemanfaatan media sosial, serta meningkatnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap isu lingkungan. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, budaya membuang sampah sembarangan, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, belum meratanya pelaksanaan sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki DLH Kota Bogor.

Hasil observasi dan analisis dokumen menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan implementasinya di lapangan. Dari perspektif DLH, berbagai program pengelolaan sampah dinilai telah berjalan sesuai target. Namun, sebagian masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat layanan, masih merasakan keterbatasan akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah dan minimnya pendampingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas advokasi belum sepenuhnya merata sehingga diperlukan peningkatan pemerataan program dan penguatan kolaborasi dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah berjalan sesuai dengan konsep strategi advokasi Coffman dan Beer, terutama dalam aspek penentuan audiens dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun demikian, perubahan perilaku masyarakat sebagai tujuan utama advokasi belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan intensitas pendampingan masyarakat, pemerataan fasilitas pengelolaan sampah, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi advokasi kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pengelolaan sampah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pendekatan kepada kelompok sasaran (audiences), yaitu publik (public), kelompok pemengaruh (influencers), dan pengambil keputusan (decision makers). Strategi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi lingkungan, kampanye kebersihan, program Bank Sampah, pemanfaatan media digital, serta



koordinasi lintas lembaga. Berdasarkan teori Coffman & Beer (2015), strategi advokasi yang dilakukan telah menunjukkan upaya untuk membangun komunikasi kebijakan secara terstruktur, meskipun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kota Bogor.

Strategi advokasi kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor juga telah memberikan perubahan pada aspek kesadaran (awareness) dan dukungan (will) masyarakat, namun belum sepenuhnya menghasilkan tindakan nyata (action) yang optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pemilahan sampah rumah tangga, minimnya keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta masih dominannya sistem pengelolaan sampah konvensional “kumpul–angkut–buang”. Dengan demikian, diperlukan penguatan komunikasi partisipatif, pemerataan program, peningkatan fasilitas pendukung, serta evaluasi berbasis perubahan perilaku agar strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Peran para pemangku kepentingan dalam mendukung strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah memiliki kontribusi yang cukup penting, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, tokoh masyarakat, media, maupun pihak swasta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berperan sebagai pelaksana utama kebijakan, sementara masyarakat menjadi aktor penting dalam implementasi pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Kelompok pemengaruh seperti tokoh masyarakat dan media juga berfungsi dalam membangun kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Namun, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan masih belum optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
3. Faktor pendukung dan penghambat menjadi aspek yang mempengaruhi keberhasilan strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bogor. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan kebijakan pemerintah, keberadaan program pengelolaan sampah seperti Bank Sampah dan TPS3R, pemanfaatan media digital, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap isu lingkungan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya kegiatan sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah mengarah pada penerapan dimensi strategi advokasi menurut Coffman & Beer (2015), yaitu audiences dan changes. Pada dimensi audiences, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah melakukan pendekatan kepada berbagai kelompok sasaran, mulai dari masyarakat (public), kelompok pemengaruh (influencers), hingga pengambil keputusan (decision makers) melalui berbagai bentuk sosialisasi, edukasi, kampanye lingkungan, serta koordinasi lintas sektor. Sementara itu, pada dimensi changes, strategi advokasi yang dilakukan telah mampu mendorong perubahan pada aspek awareness (kesadaran) dan sebagian will (dukungan atau kemauan), namun belum sepenuhnya mencapai action (tindakan nyata) secara optimal di tingkat masyarakat.

Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan advokasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersampainya informasi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah



dalam membangun keterlibatan, komitmen, serta perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bogor masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek komunikasi partisipatif, pemerataan program, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta evaluasi berbasis perubahan perilaku masyarakat. Hal ini penting agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka advokasi kebijakan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyo. (2022) *Konsep Strategi dan Proses*.
- Ambina, D. G. (2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3. No(2)*, 171–185. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.13>
- Atma Jaya Institute of Public Policy. (2024). Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek). *Kontanacademy*, (advokasi kebijakan).
- Atnan, N. (2015). Strategi Komunikasi Dalam Advokasi Hasil Penelitian (Studi: Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Unpad Tahun 2014). *Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(3)*, 339. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.52>
- Belakang, L. (2024). *Terms of Reference (ToR) Kajian Analisis Situasi Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Bogor*. (3).
- Bogor, P. K. (2020). Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3)*, 248–253.
- Cahyadi, R., & Ketut, A. (2009). *PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI JABODETABEK: TANTANGAN PENGEMBANGAN MEGAPOLITAN JAKARTA. IV(1)*, 55–72.
- Coffman, J., & Beer, T. (2015). The Advocacy Strategy Framework. Center for Evaluation Innovation, (March), 1–14.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021).167–186.
- Fajar, Y., Basori, & Mukhlis, M. (2017). MODEL ADVOKASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MENDORONG KEBIJAKAN DISTRIBUSI PENGUASAAN LAHAN UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN Yana. *Jurnal Universitas Lampung*, (2011), 186–199.
- Hermawan, E., Bogor, K., Sampah, P., & Masyarakat, K. (2022). Permasalahan Sampah Di Kota Bogor Sebagai Wilayah Penyangga Dki Jakarta Waste Problems in Bogor City As a Buffer Zone of Dki Jakarta. *Jurnal Riset Jakarta, 15(2)*, 77–86.
- Hikmat Maulana, L. (2019). URBAN WASTE MANAGEMENT MODEL (Survey on Waste Management in Bogor City). In *Jurnal Visionida (Vol. 5)*.
- Hunger & Wheelen. *Buku strategi*. (2023). *Jurnal Strategi advokasi*.
- Ilmiah, J., & Nusantara, M. (2025). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Advokasi Kebijakan Publik : Kajian Teoritis dan Praktis tentang Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara. 3*, 22–27.
- Januar, A. (2022). *Buku Advokasi Kebijakan*.



- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., Woerden, Van, F., Ionkova, K., Morton, J., Poveda, R. A., Sarraf, M., Malkawi, F., Harinath, A. S., Banna, F., An, G., Imoto, H., & Levine, D. (2018). WHAT A WASTE 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. In *The World Bank*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2025, October). *Gerakan Nasional Aksi Bersih Sampah: KLH/BPLH Tegaskan Transformasi Indonesia Bersih, Hijau, dan Berkelanjutan*. <https://Kemenlh.Go.Id/>. <https://kemenlh.go.id/news/detail/gerakan-nasional-aksi-bersih-sampah-klhbplh-tegaskan-transformasi-indonesia-bersih-hijau-dan-berkelanjutan?>
- Khairiah, N., & Harahap, M. I. B. (2021). Strategi Perencanaan desa Dalam Pengembangan UMKM Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Admisnistrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–9.
- Komputer, D. I., & Pertanian, F. T. (2019). Optimasi Distribusi Truk Pengangkut Sampah Menggunakan Algoritma Genetika Pada Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bogor. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 29(3), 260–268. <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2019.29.3.260>
- Langkat, N. K. (2023). *POLITIK MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PARTAI AMANAT NASIONAL DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat SKRIPSI OLEH: SHALSHA KHAIRUNNISA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN (Studi*.
- Lingar Vandito, R., Syabita, E., Maula Pratiwi, H., Darmawan, M., & Fatkhuri, F. (2024). Gap Implementasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Klaster Ketenagakerjaan Tentang Pemanfaatan Pekerja Asing. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 149–170. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.143>
- Mahardika, D. D. K. (2024). *STRATEGI DIRECTING UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE DI DINAS KOMINFO KOTA MEDAN*. 4(February), 4–6.
- Mandiri, A. (2016). *Review Masterplan Persampahan Kota Bogor 2016*.
- Manyamsari, I. (2014). *Agrisev Vol (15) No. 1 , 2014 47. (1), 47–66*.
- Mozin, S. Y., Dari, N. W., Geru, S., & Muchsin, F. N. (2025). *Jurnal Transformasi Humaniora PERAN KOMUNIKASI STRATEGIS DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN*. 8(3), 60–65.
- Ningrum, C. M., & Istiqomah, A. (2020). Sistem Pengelolaan Dan Nilai Ekonomi Sampah Di Pemukiman Kampung Pulo Geulis Kota Bogor. *Jambura Agribusiness Journal*, 1(2), 52–62. <https://doi.org/10.37046/jaj.v1i2.2701>
- Novian Dika Sety. (2025). Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular dan Implikasinya bagi Indonesia: Studi Kasus Kota Balikpapan. *KBPU-Pengelolaan Sampah*, 1220–1758.
- Pasaribu, Y. A. (2018). KAMPANYE KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 Public Awareness Campaign for Cultural Conservation According to Law. 27(1), 15–30.
- Raharja, E. L., Baga, L. M., & Falatehan, A. F. (2019). Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27787
- Rahmatul, Y., 1✉, A., & Istighfarrani, G. (n.d.). *Efektivitas Rumah Kompos dan Komposting Skala Kecil Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Organik di Jawa Timur Tahun 2023*.



- Rahmawati, A. F., Amin, Rasminto, & Syamsu, F. D. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. *Bina Gogik*, 8(1), 1–12.
- Rekam, accessed. (2025). *Kolaborasi Pengentasan Masalah Sampah di Kota Bogor*.
- Rizky, S. A., & Saputra, A. P. (2024). Model Collaborative Governance. 24(1), 12–29.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2019). The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. In *Theories of the policy process*, second edition (pp. 189-220). Routledge.
- Sahreza, M. (2022). Strategi komunikasi lingkungan yang mendukung keberlanjutan komunitas pengelolaan sampah di kota tangerang. *Researchgate.Net*, (January).
- Sari, D. (2022). Manajemen Strategis Perusahaan (Corporate Strategic Management). *SSRN Electronic Journal*, 1–21. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3977331>
- Satispi, E. (2022). *Modul Pembelajaran Komunikasi dan Advokasi Kebijakan*. 1–13.
- Soeharsono, Anton; Hamdi, Muchlis; Maryani, D. M. (2023). BERORIENTASI LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DI KOTA BOGOR Anton Soeharsono Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta , Indonesia Muchlis Hamdi Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta , Indonesia Dedeh Maryani Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta , I. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 209–230.
- Solusi, T. D. (2025). *Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bogor : Waste Management in Bogor Regency: Challenges and Solutions adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai . semakin penuh . TPA yang ada di Kabupaten Bogor , seperti TPA Galuga , meng*. 17(1), 123–135.
- Sri Rahayu, Y., Nuraeni, S., Ramadhini Kaustara, N., Akmal Maulana, N., Pratama Nuryadi, D., & Studi Sains Komunikasi, P. (2024). Tabel 1. Tabel Hasil Perhitungan pre-test dan post-test Peserta Pengelolaan Sampah Plastik Dalam Skala Kecil: Peran Masyarakat Dalam Mengurangi Dampak Lingkungan PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DALAM SKALA KECIL: PERAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN. *Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, (2), 187–197.
- Sudrajat, T., Syah, M., & Erihadiana, M. (2021). Kontribusi teori kebijakan publik terhadap studi manajemen pendidikan islam. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 178–191.
- Syofii, M., Alfirdaus, L. K., Ilmu, M., & Universitas, P. (2020). Koalisi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan relokasi warga tambakrejo kota semarang. 8(1).
- Yona, S. (2014). Penyusunan Studi Kasus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(2), 76–80. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.177>
- Yunandar, F., Aji, J. F., Wibisono, W., & Purwanto, E. (2025). Strategi Komunikasi Publik dalam Kampanye Pengelolaan Sampah. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(4), 20. <https://doi.org/10.47134/interaction.v1i4.3607>